

## TAJUK RENCANA

### Di Balik Pembekuan VOA

**TANGGAL** 15 Maret 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif untuk menghentikan pendanaan Voice of America (VOA) dan lembaga penyiaran lainnya yang didanai pemerintah. Keputusan ini berdampak langsung pada sekitar 1.300 karyawan VOA, yang kini dalam status cuti paksa dan tidak diizinkan untuk mengakses kantor mereka. (KR 18/3).

Keputusan ini diambil sebagai bagian dari perintah eksekutif yang menyatakan bahwa U.S. Agency for Global Media (USAGM), yang menaungi VOA, adalah elemen birokrasi federal yang dianggap tidak diperlukan. Trump mengklaim bahwa pemotongan ini akan mengurangi beban bagi pembayar pajak, dengan nada sinis terhadap jaringan yang telah beroperasi selama puluhan tahun untuk melawan propaganda dari negara-negara seperti Rusia dan Tiongkok.

Kari Lake, penasihat senior Trump, menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran bertujuan mengurangi pengeluaran pemerintah yang dianggap tidak perlu. Juga memastikan bahwa pajak rakyat tidak digunakan untuk "propaganda radikal". Bagi direktur VOA, Michael Abramowitz, bahwa keputusan ini sangat menyedihkan dan akan menghambat misi VOA untuk menyampaikan berita dan budaya kepada dunia.

Hal ini berdampak langsung pada operasional VOA, termasuk layanan berbahasa Indonesia, yang telah berfungsi sebagai sumber informasi penting bagi masyarakat sejak 1942. Para jurnalis kini dilarang melakukan wawancara atau reportase, sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah 83 tahun VOA.

Kebijakan ini tentu saja menuai kritik luas dari berbagai kalangan, termasuk kelompok advokasi kebebasan pers, yang menilai tindakan tersebut sebagai ancaman terhadap kebebasan berpendapat dan informasi di seluruh dunia. Mantan Kepala Keuangan Badan Media Global AS,

Grant Turnet, menyebutnya sebagai "Sabtu Berdarah" bagi kebebasan pers.

Direktur VOA, Michael Abramowitz, menyatakan bahwa pemotongan anggaran ini menghalangi misi lembaga untuk menyampaikan berita yang akurat dan tidak terdistorsi. Kritikus menilai bahwa tindakan ini dapat merusak kredibilitas media AS di mata dunia, terutama di negara-negara dengan kebebasan pers yang terbatas.

Pemangkasan anggaran ini juga dapat berdampak pada lembaga penyiaran lain yang didanai pemerintah, seperti Radio Free Europe dan Radio Free Asia, yang mungkin menghadapi pemotongan serupa atau bahkan penutupan. Ini menciptakan kekhawatiran akan hilangnya suara alternatif dalam jurnalisme internasional.

Dengan berkurangnya sumber daya dan kemampuan untuk memproduksi konten berkualitas, VOA bisa kehilangan pengaruhnya sebagai alat diplomasi informasi AS di luar negeri. Ini juga berpotensi menguntungkan narasi dari negara lain yang mungkin berusaha mendiskreditkan informasi yang disampaikan oleh media Barat.

Mereka menilai bahwa pemangkasan anggaran tersebut akan merusak kebebasan informasi dan mengancam misi VOA dalam menyampaikan berita yang akurat kepada dunia. Kelompok seperti Reporters Without Borders telah menyatakan bahwa kebijakan ini menandai ancaman serius terhadap kebebasan pers di seluruh dunia.

Pembekuan pendanaan untuk VOA dan lembaga sejenis dapat memiliki dampak jangka panjang bagi jurnalisme di tingkat internasional. Dengan hilangnya sumber pendanaan dan dukungan bagi media independen, ada kekhawatiran bahwa banyak outlet berita akan terpaksa menghentikan operasi mereka atau bergantung pada sumber pendanaan yang mungkin membahayakan independensi editorial mereka. (\*\*\*)-d

# Wabah Korupsi hingga Delusi Pendidikan



**RIUHNIA**

memberitaan mega korupsi di Indonesia belakangan ini menjadi perbincangan masyarakat. Bak wabah, sederet pemberitaan memberi gambaran bahwa negara Indonesia telah digerogeti hampir setiap aspeknya, tak luput juga pada sektor pendidikan.

Ragam skandal korupsi besar dengan total kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah hadir di tengah-tengah kita. Seperti yang ditemui pada laman umj.ac.id (28/2) terdapat tajuk unik tentang Liga Korupsi Indonesia. Kasus terbesar adalah korupsi di PT Pertamina dengan potensi kerugian hampir Rp 1 kuadriliun, disusul oleh korupsi PT Timah sebesar Rp 300 triliun, dan skandal BLBI yang menyebabkan negara rugi Rp 138,44 triliun sejak krisis moneter 1997. Kasus lainnya mencakup korupsi Duta Palma (Rp 78 triliun), PT TPPI (Rp 37,8 triliun), PT Asabri (Rp 22,7 triliun), serta PT Jiwasaraya (Rp 16,8 triliun). Di sektor pendidikan juga terdapat kasus korupsi salah satunya dilansir pada laman krjogja.com (12/2/2024) lalu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Purbalingga sedang menyelidiki dugaan penyimpangan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Kasus-kasus di atas menunjukkan besarnya tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia. Maka, maraknya kasus korupsi bahkan di lingkungan institusi pendidikan menciptakan delusi dalam sistem pendidikan di Indonesia. Delusi/Waham menurut Baihaqi (2005) merupakan keyakinan tentang suatu isi pikiran yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Dikaitkan dengan dampak korupsi di atas yakni akan ada penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah hingga sektor pendidikan.

Pada ranah pendidikan misalnya, dunia pendidikan yang seharusnya menjadi pembentukan karakter justru terdapat oknum-oknum yang menciderai hati masyarakat. Padahal satuan pendidikan sebagai wadah pembentukan karakter dan memiliki perangkat mempertebal karakter positif peserta didik justru turut andil

**Ichsan Y Nuansa**

dalam menambah daftar tindak korupsi yang dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab.

Terdistorsinya laten korupsi pada seseorang terbukti telah menciptakan arus *survival* yang tidak sehat alias instan. Arus itu akan mengorbankan dirinya serta orang lain. Integritas sistem pendidikan seolah menjadi suatu hal mewah bagi orang-orang yang telah terjerat progres praktis tersebut. Misalnya, bisa jadi pencapaian akademik bukan lagi berdasarkan pada ke-



KR-JOKO SANTOSO

mampuan atau prestasi, melainkan menggunakan kekayaan dan koneksi untuk mencapai kedua hal itu. Ditegaskan pula oleh Poerwadarminta (1982:524), korupsi merupakan perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya). Hasilnya pencapaian utama dari tindakan curang-jelas untuk memperkaya diri sendiri dengan cara apapun.

Kini figur teladan khususnya dalam dunia pendidikan yang tidak terjebak pola pikir pragmatis mulai sulit ditemukan. Tidak lain bermusabab menurunnya kepercayaan seseorang pada dunia pendidikan, terlebih dikuatkannya pemberitaan kasus korupsi yang tidak henti-henti. Bila dunia pendidikan membiarkan adanya proses korupsi dimulai dari oknum peserta didik yang membuat kecurangan menyontek, atau bahkan oknum sivitasnya berbohong hingga penggelapan tanpa konsekuensi serius dapat menjadi masalah serius.

Satuan pendidikan pastinya telah menerapkan pendidikan karakter di tiap kurikulum seperti nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas agar peserta didik terbiasa dengan prinsip-prinsip moral yang kuat. Perlunya institusi pendidikan mendesain ulang sistem pendidikan yang berkualitas tersebut. Seperti halnya peningkatan pengawasan terhadap proses pelayanan pendidikan antara pendidik dan peserta didik dilanjutkan pemantauan perkembangan sosial serta spiritualitas mereka. Transparansi penggunaan fasilitas yang berhubungan dengan manajemen keuangan, pengadaan barang dan jasa serta sistem penelusuran manajemen juga perlu digalakkan. Selanjutnya, meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi dengan tujuan *rule of law* yakni memperkuat budaya hukum dalam proses pemberantasan korupsi salah satunya penyempurnaan materi hukum pendukung.

Domain pendidikan adalah memperkuat akal seseorang agar dapat membedakan mana yang buruk dan baik. Korupsi ialah tindakan merusak terlebih dalam dunia pendidikan pasti akan menjadi ancaman serius yang merubah moral seseorang. Institusi pendidikan harus mempertahankan esensi utamanya sebagai alat pembentuk karakter dan intelektual bangsa di negeri ini agar delusi atau ketidakpercayaan segera sirna. Negeri ini harus memiliki generasi penerus yang konstruktif bukan penerus destruktif. (\*)-d

**\*Ichsan Y Nuansa Putra MPd**  
Gr, guru Bahasa Indonesia dan guru Teater di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Sekretaris MGMP Bahasa Indonesia SMA DIY dan pengurus PGRI Cabang Khusus SMA/SMK Kota Yogyakarta.

### Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas dan foto diri. Terimakasih.

# Anggaran dan Integritas



**SETIAP** tahun,

pemerintah daerah di Indonesia mengelola anggaran dalam jumlah yang sangat besar. Dana ini berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat serta

transfer dari pemerintah pusat. Anggaran tersebut seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik. Namun, pertanyaan yang sering muncul adalah: apakah anggaran ini benar-benar dikelola dengan baik? Apakah laporan keuangan yang disusun pemerintah daerah mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya? Atau justru ada celah yang digunakan untuk menutupi kelemahan dalam pengelolaan anggaran?

Kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah sangat bergantung pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Laporan keuangan bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan cerminan dari bagaimana dana publik digunakan. Ketika laporan keuangan disusun dengan jujur dan akurat, masyarakat dapat menilai apakah kebijakan pemerintah telah berjalan sesuai rencana atau justru menyimpang. Sayangnya, realitas menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan daerah masih bervariasi. Ada daerah yang mampu mendapatkan opini audit wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tetapi ada pula yang masih bermasalah dengan laporan keuangannya.

Sebuah penelitian oleh Rakhman dan Wijayana (2024) mengungkap fakta menarik: daerah dengan tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih tinggi cenderung memiliki kualitas laporan keuangan yang lebih baik. Dengan kata lain, daerah yang penduduknya memiliki pendidikan lebih baik, tingkat kesehatan lebih tinggi, dan standar hidup lebih layak ternyata lebih mampu menyusun laporan keuangan secara rapi dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Ini masuk akal,

**Bartolomeus Galih Visnu Pradana**

karena semakin berkualitas sumber daya manusia di suatu daerah, semakin baik pula pemahaman mereka terhadap sistem pelaporan dan akuntansi yang diterapkan di pemerintahan daerah. Selain itu, daerah dengan IPM tinggi biasanya mendapat lebih banyak pengawasan dari akademisi, media, dan masyarakat, yang mendorong transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.

Namun, penelitian ini juga mengungkap sisi lain yang cukup mengejutkan. Meskipun daerah dengan IPM tinggi lebih mampu menghasilkan laporan keuangan yang bersih, mereka juga lebih sering terlibat dalam *accruals management* sebuah praktik akuntansi yang masih dalam batas legal tetapi memungkinkan angka dalam laporan keuangan dimanipulasi agar terlihat lebih baik daripada kondisi aslinya. Pemerintah daerah dengan sumber daya manusia lebih baik cenderung lebih mahir menyesuaikan angka dalam laporan, misalnya dengan mengatur pengakuan pendapatan atau biaya agar terlihat lebih stabil dan menguntungkan. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi keterampilan dan pengetahuan seseorang dalam bidang keuangan, semakin besar pula kemungkinannya untuk memanfaatkan celah dalam aturan guna menyusun laporan yang tampak menguntungkan bagi pemerintah daerah, meskipun kenyataan sebenarnya bisa saja berbeda.

Paradoks ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah peningkatan kualitas sumber daya manusia secara otomatis menjamin transparansi keuangan? Jawabannya tidak sederhana itu. Pendidikan dan kesejahteraan memang penting, tetapi tanpa sistem pengawasan yang ketat dan budaya integritas yang kuat, keterampilan teknis yang tinggi justru bisa menjadi alat untuk menyalahi aturan.

an. Oleh karena itu, selain fokus pada pembangunan manusia, kita juga perlu memastikan adanya sistem audit yang efektif, meningkatkan peran media dan masyarakat dalam mengawasi anggaran daerah, serta menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini di kalangan aparat sipil negara.

Lebih dari sekadar mendorong profesionalisme dan kompetensi, tata kelola keuangan yang baik membutuhkan ekosistem yang mendukung transparansi. Masyarakat harus diberikan akses yang lebih luas terhadap laporan keuangan daerah agar bisa ikut mengawasi bagaimana dana publik digunakan. Selain itu, pemerintah pusat juga perlu memperketat regulasi dan memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap penyimpangan yang terjadi. Sebab, tanpa pengawasan yang kuat, kecerdasan dan keterampilan bisa disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.

Jika peningkatan kapasitas sumber daya manusia saja tidak cukup untuk menjamin transparansi keuangan daerah, lalu apa langkah konkret yang harus kita lakukan agar keuangan publik benar-benar dikelola dengan jujur dan bertanggung jawab? (\*)-d

**\*Bartolomeus Galih Visnu Pradana SE MSc**  
Dosen Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

## Pojok KR

Presiden : Pengangkatan CPNS dipercepat.  
- **Menunggu itu sungguh membosankan.**

\*\*\*

6 Juta pemudik bakal banjir DIY.  
- **Tuan rumah harus menyiapkan segalanya.**

\*\*\*

Pemda DIY pastikan bahan pokok aman.  
- **Asal harganya jangan meroket.**

*Berabe*

## Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)

No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.  
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

**Penerbit:** PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,  
**Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

**Perintis:** H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

**Penerus:** Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.

**Komisaris:** Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.

**Direktur Utama:** Drs. H.Mohammad Idham Samawi.

**Direktur Keuangan:** Yuriya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.

**Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE.

**Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

**Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis:** Yoeke Indra Agung Laksana, SE

**Direktur Umum:** Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

**Pemimpin Umum:** Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

**Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)  
**Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrk23@yahoo.com, iklankrk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kupung (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

**Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

**Alamat Homepage:** http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.

**Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

**Perwakilan dan Biro:**

**Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani.

Wartawan : H Ishaq Zubeda Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongka Ritonga.

**Semarang :** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

**Banyumas :** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

**Klaten :** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

**Kulonprogo :** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

**Gunungkidul :** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -  
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.